



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pemilu Di Era Digital: Antara Harapan, Transparansi Dan Ancaman Disinformasi

Sopiani¹, Pita Asmara², Rifatul Hasanah.³

¹Universitas Mataram, NTB, Indonesia, sopiani.cantik23@gmail.com.

²Universitas Mataram, NTB, Indonesia, pitaasmara59@gmail.com.

³Universitas Mataram, NTB, Indonesia, rifatulh616@gmail.com.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perkembangan sistem pemilu di era digital yang telah menghadirkan paradigma baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Digitalisasi pemilu menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan serius seperti penyebaran disinformasi, kerentanan keamanan cyber, dan kesenjangan akses digital. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu digital serta merumuskan strategi efektif untuk menghadapinya, khususnya dalam konteks peningkatan keamanan data, perbaikan infrastruktur digital, dan optimalisasi peran generasi muda. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumbu ilmiah dan dokumen kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu di era digital. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan beberapa tantangan krusial dalam sistem pemilu digital, meliputi maraknya informasi palsu, kerentanan keamanan sistem, ketimpangan akses teknologi, kendala teknis dalam sistem rekapitulasi, masalah transparansi dan akuntabilitas, serta pelanggaran pemilu yang masih tinggi. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan implementasikan teknologi canggih seperti AI dan blockchain, peningkatan keamanan server dan perlindungan data, penguatan sistem deteksi serangan cyber, serta peningkatan prosedur pengawasan multi-lembaga. Penelitian ini juga menyoroti peran strategis generasi Z yang merupakan mayoritas pemilih digital native dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di era digital. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemilu yang adaptif terhadap tantangan digital, serta menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, dan akademisi dalam merancang sistem pemilu yang lebih aman, inklusif, dan partisipatif di masa depan.

Kata Kunci: Pemilu Digital, Transparansi, Disinformasi, Generasi Z, Blockchain.

*Correspondence Address:	Sopiani.cantik23@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 Juni 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pilar penting demokrasi. Di Indonesia, digitalisasi pemilu mulai diimplementasikan secara signifikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil.

Perubahan mendasar ini membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas demokrasi melalui transparansi proses, efisiensi penyelenggaraan, dan perluasan partisipasi publik.

Inovasi digital seperti sistem Sirekap pada pemilu 2024 memungkinkan masyarakat untuk mengakses hasil pemungutan suara secara real-time dan terbuka, yang sebelumnya sulit dibayangkan dalam sistem pemilu konvensional.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan potensi perbaikan, digitalisasi pemilu juga menghadirkan kompleksitas dan tantangan yang tidak sederhana. Fenomena disinformasi dan berita bohong yang menyebar masif melalui platform digital telah menciptakan ancaman serius terhadap integritas proses pemilu. Data menunjukkan bahwa selama masa kampanye Pemilu 2024, terjadi lonjakan signifikan penyebaran hoaks politik di berbagai media sosial yang berpotensi mempengaruhi persepsi dan pilihan pemilih. Selain itu, kerentanan keamanan sistem digital terhadap serangan cyber, manipulasi data, dan peretasan juga menjadi kekhawatiran yang semakin nyata, sebagaimana terlihat dari berbagai insiden gangguan pada sistem Sirekap yang menimbulkan keraguan publik terhadap akurasi hasil pemilu.

Ketimpangan akses teknologi antar wilayah Indonesia juga menjadi persoalan krusial dalam implementasi pemilu digital. Meskipun penetrasi internet telah mencapai 73,7% populasi nasional pada 2023, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara Pulau Jawa dan Kawasan Indonesia Timur. Kondisi ini berpotensi menciptakan eksklusivitas digital dalam proses demokrasi, di mana sebagian masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengawasan dan pelaporan pemilu berbasis digital.

Di tengah tantangan tersebut, munculnya generasi demografis pemilih Z sebagai baru dengan karakteristik digital native membawa dinamika tersendiri. Dengan proporsi mencapai 27,94% dari total populasi dan 60% dari pemilih Pemilu 2024, generasi Z memiliki potensi signifikan untuk menjadi agen perubahan dalam penguatan sistem pemilu digital, namun juga rentan terhadap manipulasi informasi jika tidak dibekali literasi digital yang memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tantangan-tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu di era digital dan strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk menghadapinya, khususnya dalam konteks peningkatan keamanan data, perbaikan infrastruktur digital, dan optimalisasi peran generasi muda sebagai pemilih digital native?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan dalam sistem pemilu di era digital serta merumuskan strategi efektif untuk mengatasinya. Secara khusus, penelitian ini bermaksud mengkaji kerentanan keamanan sistem, masalah transparansi dan akuntabilitas, serta merumuskan solusi praktis yang melibatkan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti AI dan blockchain, penguatan infrastruktur digital, penyempurnaan regulasi, serta pemberdayaan generasi Z sebagai aktor strategis dalam mewujudkan pemilu digital yang berintegritas dan inklusif.

METODE | METHOD

Berdasarkan permasalahan di atas maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Menurut M. Iqbal Hakim (2013) Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang terdahulu. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Alasan pemilihan metode penelitian ini karena selaras dengan metode studi literatur menurut Sugiyono (2016) yaitu studi literatur digunakan untuk mengkaji teori-teori, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teori dan hipotesis. Penggunaan metode ini juga memberikan efisiensi dari segi biaya dan waktu, selain itu metode ini cocok untuk topik yang membutuhkan pemahaman konseptual yang luas, seperti nilai-nilai ideologis dan karakter generasi dan mahasiswa. Dengan demikian, metode ini dinilai paling tepat untuk mengkaji

tantangan-tantangan dalam sistem pemilu di era digital dan bagaimana upaya atau strategi untuk menghadapinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Secara sederhana, sistem pemilu adalah cara atau metode untuk mengubah perolehan suara dalam pemilu menjadi kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Digitalisasi telah menyuntikkan energi baru dalam sistem pemilu Indonesia. Proses yang dulunya memakan waktu kini bisa diselesaikan lebih cepat berkat teknologi digital. Masyarakat dengan mudah mengakses segala informasi tentang pemilu hanya melalui genggaman smartphone mereka. Teknologi canggih seperti blockchain hadir sebagai penjaga keamanan yang tak kenal lelah, memastikan setiap suara terdokumentasi dengan rapi dan transparan. Generasi muda yang melek teknologi pun semakin antusias berpartisipasi, melihat pemilu bukan lagi sebagai acara kuno tapi sebagai bagian dari gaya hidup digital mereka.

Tantangan Dalam Sistem Pemilu

Tantangan dalam pengawasan dan pelaporan pemilu di era digital yaitu, sebagai berikut:

1. Maraknya Informasi Palsu Platform digital, khususnya media sosial, menjadi sarana penyebaran berita bohong yang mengancam kredibilitas proses pemilu dan menciptakan kebingungan di kalangan pemilih. Sebagai respons, berbagai negara telah memberlakukan regulasi ketat untuk mengontrol arus informasi selama periode kampanye dan pemilihan.
2. Kerentanan Sistem Digital Dalam konteks pemilu modern, perlindungan data menjadi aspek krusial. Infrastruktur digital yang digunakan untuk memanraui dan melaporkan hasil pemilu rentan terhadap berbagai ancaman cyber, termasuk upaya peretasan dan manipulasi data yang dapat memengaruhi hasil akhir pemilihan.
3. Ketimpangan Akses Teknologi Walaupun kemajuan teknologi menawarkan berbagai kemudahan, masih terdapat kesenjangan dalam hal aksesibilitas. Masyarakat di wilayah terpencil seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi mutakhir, yang pada akhirnya dapat mengurangi peran teknologi serta mereka dalam proses pengawasan dan pelaporan pemilu.
4. Kendala Teknologi Dalam sistem Rekapitulasi terjadi penumpukan data yang belum terverifikasi, sehingga KPU harus menutup sementara diagram hasil pemilu. Ditemukan perbedaan antara data Sirekap dan perhitungan KPU akibat kesalahan ko versi data ari TPS ke sistem, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam sistem Rekapitulasi Kegagalan Sirekap dalam menampilkan data akurat menimbulkan keraguan tentang integritas pemilu. Ketidakakuratan data dapat menghambat deteksi manipulasi dan pemalsuan suara, yang mengikis kepercayaan publik.
6. Ancaman Keamanan Data Dalam sistem Rekapitulasi kerentanan sistem terdapat serangan cyber menjadi masalah serius, sebab meskipun Sirekap hanya alat bantu, peretasan dapat mengacaukan perhitungan suara.
7. Banyaknya Kasus Pelanggaran Dalam sistem Rekapitulasi 2024 bawaslu menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama Pemilu 2024, termasuk dugaan tindak pidana, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.

Solusi dan Strategi dalam Sistem Pemilu

Upaya optimalisasi sistem pemilu di era digital memerlukan penyiapan berbagai elemen pendukung yang komprehensif. Hal ini mencakup penerapan terobosan teknologi komunikasi, penguatan proteksi data digital, perbaikan infrastruktur penunjang, serta penyempurnaan kerangka regulasi. Keempat aspek ini menjadi pilar penting dalam menyikapi perkembangan teknologi terkini, khususnya dalam konteks sosial-politik dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Perkembangan teknologi komunikasi telah mentransformasikan cara berinteraksi masyarakat. Adopsi inovasi seperti aplikasi perpesanan, platform media sosial, dan alat kolaborasi virtual memungkinkan komunikasi yang lebih dinamis dan lintas batas geografis maupun sosial. Di sisi lain, maraknya penyimpanan data digital menuntut sistem pengamanan yang lebih ketat untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman dunia maya dan potensi kebocoran data. Faktor infrastruktur menjadi komponen krusial lainnya. Jaringan internet yang stabil dan merata akan memperluas jangkauan pemanfaatan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi digital masyarakat. Tidak kalah pentingnya, penguatan regulasi perlu terus dilakukan mengingat laju perkembangan teknologi seringkali melampaui kemampuan pengaturan hukum. Kerangka regulasi yang responsif dapat memastikan pemanfaatan teknologi yang etis dan bertanggung jawab, sekaligus memitigasi dampak negatifnya, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam pemilu digital evaluasi-evaluasi sangat penting dilakukan supaya dapat memastikan akurasi hasil dari pemilu, mengatasi masalah transparansi dan akuntabilitas, menangani kerentanan keamanan data, mempertahankan legitimasi demokrasi, dan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Selain itu strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan dan pembaruan sistem rekapitulasi yaitu:

1. Peningkatan Teknologi

- a) Penggunaan AI dan Blockchain: Teknologi blockchain dapat menjamin keamanan data dan mencegah perubahan tidak sah, sementara AI dapat mempercepat analisis dan deteksi anomali.
- b) Penggunaan Server Aman dan Terpercaya: Data pemilu sebagai data strategis seharusnya disimpan di server dalam negeri yang aman sesuai peraturan yang berlaku.
- c) Peningkatan Sistem Deteksi Serangan Cyber: Memperbarui sistem keamanan, mengimplementasikan enkripsi, dan mengembangkan rencana pemulihan untuk meminimalisir dampak serangan.

2. Peningkatan Prosedur dan Pengawasan Melibatkan tiga lembaga (KPU, Bawaslu, dan DPR-RI) dalam verifikasi dan publikasi hasil untuk meningkatkan keakuratan dan transparansi.

Peran Generasi Z dalam Sistem Pemilu di Era Digital

Generasi milenial dan Gen Z saat ini sangat terampil dalam bidang teknologi dalam kehidupan mereka belum merata. Pemerintah mulai memberikan perhatian pada generasi ini dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam lembaga publik dan kehidupan demokratis. Indonesia sebagai negara demokratis menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Namun, rendahnya partisipasi generasi muda masih menjadi tantangan besar. Generasi Z, yang lahir antara 1997-2012, membentuk 60% dari total pemilih pada pemilu 2024. Meskipun tingkat golput Gen Z pada pemilu 2019 hanya 4,86%, hal ini tidak boleh diabaikan karena narasi negatif dapat meningkatkan angka golput.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap calon pemimpin yang lebih mengutamakan elit politik daripada rakyat penyebab umum golput. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan politik juga menjadi faktor penting. Pendidikan politik untuk generasi Z perlu dikembangkan secara inovatif, mengingat mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Diskusi politik melalui media sosial dapat memberi mereka akses untuk memahami isu-isu politik yang relevan.

Pemilih pemuda berusia 17-21 tahun sering menjadi target partai politik. Mereka biasanya belum sepenuhnya memahami dunia politik dan bisa menjadi sasaran empuk untuk mendapatkan dukungan tambahan. Media sosial menjadi arena persaingan konten publik online yang semakin meningkatkan polarisasi pemilih.

Banyak kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang tertarik pada politik kini menjadi sangat responsif terhadap isu politik di media sosial. Sayangnya, media online sering dieksploitasi sebagai alat politik yang tidak bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa informasi palsu cenderung menyebar lebih cepat daripada informasi yang benar di media sosial.

Generasi Z memiliki akses internet yang luas, dengan 93% anak-anak dan 97% remaja mengakses internet melalui perangkat mobile. Mereka memiliki nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya, sehingga pendekatan terhadap citra calon presiden perlu dipahami secara mendalam. Partai politik perlu menyadari bahwa generasi Z adalah mayoritas pengguna di media sosial.

Namun, perlu diperhatikan bahwa Gen Z di Indonesia dinilai sebagai yang paling kurang sopan di Asia Tenggara dalam perilaku di media sosial. Penting untuk memahami bahwa politik harus mempromosikan inklusivitas dan kesatuan untuk menghinadri konflik. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan politik mengganggu persatuan bangsa. Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berekspresi menjadi pondasi penting yang mendorong kemajuan sosial dan inovasi. Perkembangan kebebasan berekspresi di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era Orde Lama dan Orde Baru. Partisipasi politik di Indonesia mengingot sejak 1998, dan memerlukan kontribusi dari semua pihak terkait. Semua komponen masyarakat harus berperan aktif dalam menyosialisasikan proses pemilu.

Gen Z yang mencakup sekitar 27,94% dari populasi Indonesia memiliki perilaku politik yang perlu diperhatikan. Media sosial menjadi alat komunikasi politik yang penting, dan pasangan calon memanfaatkannya untuk kampanye yang inovatif. Keterlibatan aktif generasi Z dalam pemilu akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga integritas demokrasi. Mereka dapat memengaruhi arah politik negara dan memilih pemimpin yang mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi Gen Z dalam pengawasan pemilu telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan keadilan. Berdasarkan statistik, generasi Y dan Z menyumbang sekitar 47% dari total penduduk Indonesia pada 2021, yang menunjukkan potensi besar mereka dalam memengaruhi hasil pemilu 2024.

Meski teknologi memberikan kesempatan untuk terlibat dalam politik, Gen Z juga menghadapi tantangan seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Namun, peningkatan peran dan kesadaran mereka dapat menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih, inklusif, dan demokratis di masa depan.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pemilu di Indonesia membawa dualitas dampak yang signifikan. Di satu sisi, implementasi teknologi digital telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas proses pemilu, namun di sisi lain memunculkan tantangan substansial berupa ancaman disinformasi, kerentanan keamanan cyber, kesenjangan akses digital, serta masalah teknis dalam sistem rekapitulasi suara. Upaya optimalisasi sistem pemilu digital memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi penerapan teknologi canggih seperti blockchain dan kecerdasan buatan, penguatan infrastruktur digital yang merata, perbaikan regulasi, serta sistem pengawasan multi-lembaga yang efektif. Peran strategis generasi Z sebagai kelompok mayoritas pemilih dengan karakteristik digital native juga menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemilu digital yang berintegritas, dengan catatan bahwa mereka perlu dibekali literasi digital dan pendidikan politik yang memadai untuk menghadapi fenomena disinformasi dan polarisasi politik di ruang digital.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dengan judul “Pemilu Di Era Digital: Antara Harapan, Transparansi dan Ancaman Disinformasi” dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi yang tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada dosen pembimbing kami Bapak Edy Kurniansyah, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan berharga dalam penyusunan kerangka konseptual peneliti ini. Kami juga

mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan dan pusat dokumentasi yang telah menyediakan akses terhadap berbagai literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen kebijakan yang menjadi landasan teoritis peneliti ini. Dukungan akses informasi tersebut sangat membantu dalam proses analisis dan perumusan rekomendasi strategis.

Penghargaan tinggi kami sampaikan kepada rekan-rekan peneliti dan komunitas akademik yang telah memebrikan diskusi konstruktif dan kritik membangun selama proses penelitian berlangsung. Kolaborasi dan pertukaran ide yang terjadi telah memperkaya perspektif dan memperdalam analisis dalam penelitian ini.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada keluarga dan shabat yang telah memberikan dukungan moral dan semangat tanpa henti. Motivasi dan pengertian mereka menjadi kekuatan penting dalam menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

Tidak lupa, kami mengapresiasi kontribusi generasi muda, khususnya Generasi Z, yang telah menjadi inspirasi dalam penelitian ini. Semangat dan antusiasme mereka dalam menghadapi era digital menjadi harapan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem pemilu digital Indonesia dan menjadi referensi yang berguna bagi para akademisi, praktis, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih transparan, aman, dan inklusif.

REFERENSI | REFERENCE

- Aliano. Y. A., Adon. M. J. (2023). Percaturan Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu 2024 di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 6(3); 475-484.
- Diniyanto. A., Sutrisno. W. (2020). Pengawasan Pemilihan Umum di Era-Post-Truth: Problem, Tantangan dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*. 5(1); 44-58.
- Juliyansyah. Y. J., Hida. A. M. (2024). Analisis Sentimen Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Menggunakan Metode LSTM RNN. *Journal of Information System Research (JOSH)*. 6(1); 557-565.
- Kurniawanysah. E., Alqodri. B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. 4(2); 286-292.
- Lubis. M. A., Gea. M. Y. A., Muniffah. N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Elektronik Voting (e-voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Penegak Hukum*. 9(1); 44-56.
- Nurdin, R. (2024). Trolls, Disinformasi, and Strategi Kampanye: Tantangan Demokrasi Digital dalam Pemilu 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 6(1); 1-26.
- Rasji, Marina, & Vaustine, G. (2025). Tantangan dan Peluang Pemilu di Era Digital: Memanfaatkan Peran Media Sosial dalam Kampanye. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1); 1-8.
- Ricky. (2022). Pengembangan Studi Tentang Pemilu dan Digitalisasi Secara Global dan Tantangannya di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Musamus Journal of Publik Administration*, 5(1); 133-139.
- Rosa. V. D., Fadilha. D., Tangguh. R. S., Anwar., Randa. M. (2024). Peran Generasi Z Dalam Pemilu Yang Bersih Dan Demokratis. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 7(2); 4654-4660.
- Sofiah, R., Suhartono, & Hidayah. R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 7(1); 1-15.
- Wibowok. K. (2024). Urgensi Evaluasi Sistem Rekapitulasi Suara pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*; 61-76.